

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN
DALAM PENGELOLAAN PKL (PEDAGANG KAKI LIMA)
OLEH DINAS PASAR KOTA PADANG
DI JALAN PASAR RAYA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

HARRY FERDINANDA
05 193 064



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



ABSTRAK

Harry Ferdinanda (05 193 064). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pembimbing I Drs. Yoserizal M, Si dan Pembimbing II Dr. Maiyulnita. Judul Skripsi "Penerapan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan PKL (Pedagang Kaki Lima) Oleh Dinas Pasar Kota Padang di Jalan Pasar Raya".

Fenomena keberadaan PKL ini, merupakan salah satu permasalahan yang sangat rumit dihadapi oleh pemerintah kota. Keberadaan mereka sering bertentangan dengan nilai-nilai K3. Contoh nyata dari permasalahan ini adalah pada jalan pasar raya padang. Di mana jalan ini ditempati oleh berbagai macam para penjual kaki lima (PKL). Keberadaan mereka telah menyebabkan keadaan jalan ini menjadi penuh sesak dan kurang tertib. Pasar memang diperuntukkan untuk aktivitas jual beli dan keberadaan PKL sudah menjadi hal yang sewajarnya. Tetapi disaat jumlah PKL yang ada sudah melewati batas yang wajar dan sudah mengganggu nilai-nilai K3 (kebersihan, ketertiban dan keamanan), diperlukan tindakan tegas untuk menjaga dan mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Untuk itu dinas pasar selaku pihak yang berwenang untuk menata, mengatur serta menertibkan PKL ini akan menjalankan suatu pola pengawasan tertentu dalam membina dan menata keberadaan PKL ini.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, teori yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Ada empat bentuk pengawasan yang dipergunakan, yakni pengawasan yang didasarkan kepada bentuknya, terbagi atas dua macam, yakni pengawasan melekat dan fungsional. Pengawasan yang didasarkan kepada sifatnya juga terbagi kedalam dua jenis, yakni pengawasan preventif dan represif.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan seperti apa bentuk dan sifat pengawasan yang dilakukan oleh dinas pasar terhadap keberadaan PKL di jalan pasar raya padang dalam menciptakan K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban), serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

Dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini telah menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dari keempat jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar, terbukti semuanya masih belum efektif dalam membina PKL untuk menjaga dan menciptakan K3 di lingkungan jalan pasar raya padang. Banyaknya kendala yang dihadapi dari setiap jenis pengawasan yang dilakukan menyebabkan ketidak efektifan ini. Keterbatasan pemimpin dalam mengawasi kinerja petugasnya, terjadinya perbenturan kewenangan antara dinas pasar dengan dinas perhubungan dalam menertibkan PKL yang berada di areal parkir, jumlah petugas yang tidak mencukupi, hingga sifat dari petugas lapangan yang kurang responsif terhadap kondisi pasar merupakan beberapa hal yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Hal ini berujung kepada kondisi jalan pasar raya yang kurang tertata dengan rapi dan jauh dari nilai-nilai K3.

Kata kunci: Pengawasan, Dinas Pasar dan PKL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses pembangunan ekonomi disuatu negara secara alamiah akan menimbulkan kesempatan besar yang sama bagi semua jenis kegiatan ekonomi, termasuk industri dari berbagai skala usaha. Di Indonesia pertumbuhan usaha industri skala kecil yang memproduksi jenis-jenis barang konsumsi tertentu seperti makanan, pakaian jadi, tekstil dan alat-alat rumah tangga, tetap mendapat tempat di pasaran dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat dari berbagai industri skala menengah dan besar lainnya¹. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya kita sebagai konsumen untuk menjatuhkan pilihan terhadap barang-barang kebutuhan harian kita. Pertumbuhan industri skala kecil ini juga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL). PKL sebagai sektor informal dalam perekonomian, menjadi salah satu sarana yang efektif dalam memasarkan produk-produk hasil olahan industri skala kecil tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang cukup pesat juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan jumlah PKL di suatu daerah perkotaan. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan mereka terhadap barang-barang penunjang kehidupan mereka. Tingkat kebutuhan ini akan memicu

¹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)* (Ed. Revisi), Bumi Aksara, Jakarta 2005, Hal. 155.

perkembangan industri-industri pengolahan barang jadi dan para distributor barang olahan tadi, salah satunya pedagang kaki lima (PKL).

Fenomena keberadaan PKL ini, merupakan permasalahan yang sangat rumit sekali dihadapi oleh pemerintah kota. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PKL yang sangat tinggi di daerah perkotaan, sedangkan pemerintahan kota mempunyai pandangan negatif terhadap fenomena ini. Basis perekonomian kota yang didominasi oleh kegiatan Perdagangan dan jasa, akan semakin menumbuh suburkan keberadaan PKL sebagai sektor rill roda perekonomian². Keberadaan PKL pada umumnya dinilai oleh pemerintah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah yang telah diberlakukan, karena PKL sering mempergunakan areal untuk berdagang yang tidak semestinya, seperti menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang tidak diperuntukan bagi PKL, PKL penyebab terjadinya kemacetan, PKL membuat kota menjadi tidak indah dan bersih, serta PKL telah menciptakan kesemrawutan di tengah-tengah kota³. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Kota Padang, PKL merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dan dicarikan solusinya.

Keberadaan PKL yang terdiri dari berbagai pedagang buah, pakaian jadi, mainan anak-anak, makanan dan minuman dan lain sebagainya, merupakan soko guru perekonomian menengah kebawah. Keberadaan

² *Ibid.*, Hal. 158

³ Shinta Megawati Sandra Dewi. 2007. *Perlawanan Ikatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menentang Kebijakan Pemerintah Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang, Hal. 2

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Untuk menciptakan nilai-nilai K3 (kebersihan, keamanan dan ketertiban) di lingkungan pasar Dinas Pasar telah membentuk suatu bidang yang khusus bertugas untuk mewujudkan dan memelihara K3 (kebersihan, keamanan dan ketertiban) di lingkungan pasar. PKL merupakan salah satu pihak yang sering melanggar nilai-nilai K3 ini, keberadaan mereka cenderung tidak tertib dan tidak jarang menjadikan suatu lokasi menjadi kotor dan jauh dari nilai-nilai K3. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh bidang K3 terhadap PKL yang berada di jalan pasar raya adalah dengan melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada PKL untuk menjaga K3.

1. Bentuk dan sifat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap keberadaan PKL di jalan pasar raya dalam menciptakan K3
 - a. Bentuk pengawasan yang dilakukan
 - a) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan berkaitan dengan langkah pembinaan terhadap PKL agar terjaganya nilai K3, di lakukan oleh kepala bidang K3 terhadap kondisi internal bidangnya. Pengawasan melekat pada bidang K3 juga dilakukan oleh masing-masing kepala seksi, yakni seksi kebersihan dan seksi trantib.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bohari, H. 2001. *Pengawasan keuangan negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2000. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2003. *Manajemen (dasar, pengertian , dan masalah)* (ed.) Revisi. Cet. 2. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P. Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Millahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sanapiah, Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang.
- Siagian. 1982. *Filsafat Administrasi*. (Cet.) ke 11. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Siswanto, B. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2000. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen*. (Ed.) 1 Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Syamsi, Ibnu. 1988. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*. (Ed.) Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, Robert. K. 2004. *Studi Kasus Desain Dari Metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

ATURAN HUKUM

- Keputusan Walikota No. 28 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar.
- Keputusan walikota No. 43 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar
- Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Perda No.12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.
- Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.